

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PENERAPAN *ERROR CORRECTION MODEL*

Yulistiani Eka Pratiwi
Dinar Melani Hutajulu*
Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman 39, Magelang, Indonesia, 56116
Email: yulisprtw20@gmail.com, dinarmelani@untidar.ac.id*

*penulis penanggungjawab

Diterima 22 September 2022, direvisi 20 Oktober 2022, disetujui 17 November 2022

ABSTRAK

Implementasi otonomi daerah di Indonesia memberikan keleluasaan pada masing-masing daerah untuk pengelolaan potensi wilayahnya sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan. Salah satu bentuk pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah salah satu kriteria guna mengukur dan mengevaluasi keberhasilan otonomi dan kemandirian daerah. Kemandirian Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari rasio kemandirian diukur dengan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan transfer daerah. Rasio kemandirian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat masih bertopang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu menelaah variabel-variabel yang mempengaruhi PAD Provinsi Jawa Barat. Variabel independen yang digunakan yaitu jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PMDN dan PMA. Sedangkan variabel dependennya yaitu PAD. Pada analisis ini digunakan data sekunder berupa runtut waktu (*time series*) mulai tahun 1990-2021 yang termuat di publikasi Badan Pusat Statistik. Model estimasi yang digunakan Pendekatan *Error Correction Model* (ECM). Hasil pengujian dan olah data menunjukkan bahwa ketika jangka panjang jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PMDN dan PMA mempengaruhi PAD. Sementara itu pada jangka pendek variabel PMDN saja yang berdampak atas PAD.

Kata Kunci: Ekonomi Regional, Investasi, Keuangan, Model Deret Waktu.

JEL Code: C32, E22, P34, R11

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy in Indonesia provides flexibility for each region to manage regional potential in accordance with regional regulations based on legislation. Some regional revenues, namely Regional Original Income sourced from taxes, levies and the results of wealth management are separated from other legitimate income. Regional Original Income (PAD) is one of the criteria used to measure and evaluate the success of regional autonomy and independence. The independence of West Java Province can be seen from the ratio of independence which is measured by the comparison between local revenue and regional transfers. The independence ratio shows that West Java Province is still supported by transfer funds from the central government to finance regional expenditures. The purpose of this study is to examine the variables that affect the PAD of West Java Province. The independent variables used are population, government spending, PMDN and PMA. While the dependent variable is PAD. The data used is secondary data in the form of time series from 1990-2021 which is contained in the publications of the Central Statistics Agency. The estimation model used is the Error Correction Model (ECM) approach. The results of data processing show that in the long term population, government spending, PMDN and PMA affect PAD. Meanwhile, in the short term, only the PMDN variable has an impact on PAD.

Keywords: Financial, Investment, Regional Economic, Time-series Model.

JEL Code: C32, E22, P34, R11

DOI: <https://doi.org/10.24123/jeb.v26i2.5236>

1. PENDAHULUAN

Sejak pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwasanya Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah, dimana setiap daerah mendapatkan keleluasaan untuk mengelola potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan. Otonomi daerah bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan kekayaan antar wilayah. Karena itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan dituntut untuk mandiri dan berinovasi dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memanfaatkan peluang sebagai pemasukan kas daerah. Politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta agama merupakan bidang pemerintahan yang tidak boleh ditangani oleh pemerintah daerah. Meskipun hak kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah daerah, namun terdapat hibah atau bantuan yang masuk pada menu transfer daerah.

Sumber pendapatan daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbentuk dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain pendapatan sah. Peran pajak Provinsi Jawa Barat bagi PAD belum optimal sehingga bergantung pada pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan (Zakaria & Syahputra, 2022). Sumber PAD dipungut sesuai pada Peraturan Daerah berlandaskan peraturan undang-undang yang berlaku. PAD merupakan sumber pendapatan daerah terpenting karena menjadi tolak ukur kemandirian dan keberhasilan otonomi daerah. Perbandingan antara jumlah PAD dengan transfer daerah akan menggambarkan kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerah.

Tabel 1

Rasio Kemandirian Keuangan di Provinsi Jawa Barat

No	Tahun	Rasio PAD	Rasio Dana Transfer
1	2017	33,88%	49,69%
2	2018	32,55%	61,33%
3	2019	33,10%	48,93%
4	2020	32,53%	52,85%
5	2021	40,82%	56,91%

Sumber: DJPB Kemenkeu diolah, 2022

Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021 daerah dapat dikatakan mandiri dalam hal keuangan ketika daerah tersebut mampu mendanai belanja pemerintah, pembangunan serta pelayanan dari sumber pendapatan daerah yaitu PAD. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2021 di Provinsi Jawa Barat rasio dana transfer lebih besar dibandingkan dengan rasio PAD. Hal ini berarti Provinsi Jawa Barat belum mandiri dalam membiayai belanjanya, masih bergantung pada dana transfer atau anggaran yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2

Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)	Pengeluaran Pemerintah (Rp)
2017	48037827	24162879650
2018	48683860	36482714855
2019	49316710	39199187030
2020	48274150	39376315680
2021	48782402	44715065660

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah, 2022

Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan belanja daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat, yang permodalannya masih bertopang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Sari, Garvera, & Anwar, 2018). Permasalahan tersebut sama dengan kondisi Provinsi Jawa Barat dimana jumlah penduduk meningkat dan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Provinsi Jawa Barat sendiri ialah provinsi dengan populasi penduduk terpadat.

Populasi yang banyak dapat menjadi tantangan dan peluang. Semakin banyak penduduk maka akan meningkatkan pengangguran. Sehingga peningkatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal agar pengangguran tidak bertambah melainkan dapat meningkatkan pendapatan bagi Provinsi Jawa Barat. Peningkatan jumlah penduduk memiliki dampak positif terhadap PAD melalui pajak atau retribusi yang dibayarkan (Zein, 2018). Hal ini karena penduduk memiliki kewajiban pajak atau biasa disebut dengan wajib pajak.

Penduduk juga merupakan unsur terpenting pada sektor perekonomian yang berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka permintaan akan barang atau jasa akan meningkat. Seiring dengan itu, belanja daerah atau pengeluaran pemerintah juga meningkat. Melalui otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kebebasan mengenai pengelolaan daerahnya untuk mendapatkan sumber pembiayaan belanja daerah. Sehingga pembiayaan tersebut dapat berguna untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pembangunan.

Menurut Zein (2018) pengeluaran pemerintah adalah komponen dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menjalankan perekonomian dengan menetapkan besaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Terdapat dua kategori pengeluaran pemerintah yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Martins & Veiga, 2014). Pengeluaran rutin digunakan sebagai konsumsi pemerintah sedangkan pengeluaran pembangunan sebagai investasi pemerintah. Adapun pengeluaran rutin tidak berkaitan langsung dengan pembentukan modal untuk meningkatkan produksi, tetapi berkaitan dengan pengelolaan aktivitas administrasi guna mendukung pembangunan (Elvianti, 2017).

Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mendorong pemanfaatan potensi daerah pada sektor perekonomian seperti investasi untuk meningkatkan PAD sebagai pembiayaan belanja daerah. Melalui investasi maka diharapkan dapat membantu untuk mengatasi kekurangan modal dalam membiayai pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berinvestasi di sektor tertentu juga dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dapat menyelesaikan sejumlah masalah, krisis dan tantangan ekonomi (Kambono & Marpaung, 2020).

Menteri Penanaman Modal/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengemukakan bahwa Provinsi Jawa Barat adalah wilayah yang banyak dipilih oleh pemilik modal asing ataupun dalam negeri untuk berinvestasi, karena didukung infrastruktur dan pelayanan internal yang baik serta tingkat produktivitas masyarakatnya sangat baik (Saputra, 2021). Stabilitas politik dan keamanan juga merupakan faktor yang mendorong investor karena berpengaruh pada risiko kegagalan yang berkaitan dengan rentang birokrasi, transparansi dan kepastian hukum, keahlian teknologi, jaminan perlindungan investasi, ketenagakerjaan, akses pasar, dan lainnya (Lubis & Ani, 2018). Permodalan di Indonesia terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Iklim investasi membutuhkan kondisi yang kontributif, promotif, kepastian hukum, keadilan dan keefisienan, serta tetap memerhatikan kepentingan nasional. Selain itu, investasi seperti PMA dan PMDN dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang ekonomi dan sosial (Rumondor, 2017).

Penelitian yang dilakukan Saputra (2021) mengenai faktor yang mempengaruhi PAD Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019 dengan menggunakan variabel PDRB, pajak daerah, retribusi daerah

dan jumlah penduduk. Metode yang digunakan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM). Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara individu pajak daerah dan jumlah penduduk berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif namun, tidak signifikan.

Bersumber pada latar belakang informasi di atas, studi kasus ini memiliki tujuan guna menelaah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PAD. Faktor-faktor tersebut yaitu jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PMDN dan PMA. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau evaluasi kepada pihak yang ingin meneliti serta menjadi pandangan untuk pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan kebijakan mengenai keuangan daerah Provinsi Jawa Barat.

2. METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time-series* dari tahun 1990-2021 yang termuat pada publikasi Badan Pusat Statistik. Variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel bebas meliputi jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PMDN dan PMA. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satuan ribuan rupiah, dan Jumlah Penduduk (JP) dalam satuan jiwa. Pengeluaran pemerintah (PP) dalam penelitian ini menggunakan realisasi belanja daerah dalam satuan ribuan rupiah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam satuan miliar rupiah, dan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam satuan jutaan rupiah.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi PAD baik dalam jangka panjang atau jangka pendek yaitu mempergunakan model *Error Correction Model* (ECM) yang diolah melalui *software E-views 10*. Pada persamaan model ekonometrika jangka panjang terdapat *error term* (e_t) sebagai variabel pengganggu yang tidak terdapat pada model namun, mempengaruhi variabel terikat. Persamaan model dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$PAD_t = f(PEND_t, PP_t, PMDN_t, PMA_t) \quad (1)$$

Dari model tersebut didapatkan model linearnya sebagai berikut:

$$PAD_t = \beta_1 PEND_t + \beta_2 PP_t + \beta_3 PMDN_t + \beta_4 PMA_t \quad (2)$$

Sedangkan untuk persamaan model ekonometrika jangka panjang sebagai berikut:

$$PAD_t = \beta_0 + \beta_1 PEND_t + \beta_2 PP_t + \beta_3 PMDN_t + \beta_4 PMA_t + e_t \quad (3)$$

Permasalahan yang muncul dalam regresi dengan data runtut waktu yaitu regresi palsu yang diakibatkan oleh data tidak stasioner (Buhaerah, 2017). Uji *root test Augmented Dickey-Fuller* (ADF) yang dipilih dalam penelitian ini untuk mengetahui stasioneritas data. Jika data yang digunakan terdapat *unit roots* maka data tersebut tidak stasioner. Selain itu, ketika data telah stasioner, maka dapat melanjutkan estimasi terhadap model untuk menentukan alat analisis yang akan digunakan (Elvianti, 2017). Sedangkan hubungan jangka panjang antara variabel dapat diketahui dari uji kointegrasi. Uji kointegrasi *Durbin Watson*, *Engle-Granger*, dan *Johansen* merupakan metode yang dapat diaplikasikan dalam uji kointegrasi (Buhaerah, 2017).

Dalam studi kasus ini memilih uji *Engle-Granger* (EG) dengan menguji akar unit ADF pada residual hasil estimasi model regresi. Selain itu, penelitian ini menggunakan uji *Johansen* dengan melihat nilai *trace statistic* dan nilai *maximum eigenvalue*. *Error Correction Model* (ECM) bermaksud guna mengetahui seberapa ekstensif dan cepat antar variabel mengarah pada ekuilibrium kembali dalam jangka pendek. Model ECM mampu menggunakan lebih banyak variabel untuk analisis jangka pendek dan konsistensi model empirik dengan teori ekonomika, serta dapat menjelaskan ketidakseimbangan antara fenomena yang diinginkan pelaku ekonomi dengan kenyataannya (Kurniasih, 2019). Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan estimasi ECM yaitu data stasioner di level yang sama dan residual stasioner di level guna menunjukkan terdapat

kointegrasi. Persamaan ECM yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dalam studi kasus ini sebagai berikut:

$$\Delta PAD_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta PEND_t + \beta_2 \Delta PP_t + \beta_3 \Delta PMDN_t + \beta_4 \Delta PMA_t + \beta_5 ECT + e_t \quad (4)$$

Dengan:

Δ = Perubahan

ECT = Error Correction Term

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Asumsi Klasik

Asumsi klasik mencakup uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Pada uji asumsi klasik terdapat syarat yang harus dipenuhi ialah BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Hasil uji asumsi klasik membuktikan bahwa model yang dipilih dalam penelitian tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik karena kriteria BLUE telah dipenuhi. Berikut hasil uji asumsi klasik yang dilakukan:

Tabel 3
Asumsi Klasik

Uji Normalitas	Jarque-Bera	3.565335
	Prob.	0.168189
Uji Autokorelasi	Prob. F	0.6718
	Prob. Chi-Square	0.5903
Uji Heterokedastisitas (White)	Prob. F	0.0548
	Prob. Chi-Square	0.1610
Uji Multikolinearitas (Centered VIF)	C	NA
	D(Pend)	1.035034
	D(PP)	1.268562
	D(PMDN)	1.227088
	D(PMA)	1.060311
	ECT(-1)	1.382368

Sumber: Olah Data Eviews 10, 2022

Hasil asumsi klasik pada Tabel 3 menunjukkan nilai Jarque-Bera dan probabilitas masing-masing sebesar 3.56335 dan 0.168189, yang mana kedua nilai tersebut > 0.05 menggambarkan bahwa tidak terdapat masalah normalitas berarti data terdistribusi normal. Pada uji korelasi terdapat hipotesis yaitu H_0 : tidak terdapat autokorelasi sedangkan H_1 : terdapat autokorelasi. Nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.3061 dinyatakan signifikan karena $0.3061 > 0.05$, yang bermakna jika hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga jelas tidak ada autokorelasi pada data yang digunakan.

Sedangkan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui masalah yang menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien menjadi tidak signifikan. Uji heteroskedastisitas di atas mengindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena probabilitas Chi-Square yaitu $0.3163 > 0.05$. Tidak terjadi multikolinearitas ketika Centered VIF menunjukkan angka < 10 , namun jika hasil menunjukkan > 10 maka terdapat multikolinearitas (Lilian et al., 2021). Berdasarkan pada hasil pengujian di atas, tidak terdapat multikolinearitas antar variabel. Hal ini berarti tidak ditemukan korelasi diantara variabel bebas dalam model yang digunakan.

b. Hasil Uji Stasioneritas Data

Uji stasioner dilakukan pada variabel yang diteliti untuk memenuhi persyaratan model koreksi kesalahan (ECM) dimana data yang digunakan harus stasioner. Uji stasioner yang

digunakan yaitu *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Hasil pengujian stasioner pada tabel 4 menunjukkan bahwa data tidak stasioner di tingkat level. Hal ini disebabkan oleh nilai probabilitasnya tidak signifikan pada $\alpha=5\%$ atau lebih dari 0,05.

Tabel 4
Uji Stasioneritas di Tingkat Level

Variabel	Nilai ADF	Critical Value			Prob	Keterangan
		1%	5%	10%		
PAD	3.2766	-3.6793	-2.9678	-2.6230	1.0000	Tidak Stasioner
PEND	-1.0017	-3.6617	-2.9604	-2.6192	0.7402	Tidak Stasioner
PP	0.5427	-3.6793	-2.9678	-2.6230	0.9853	Tidak Stasioner
PMDN	0.7969	-3.6702	-2.9640	-2.6210	0.9923	Tidak Stasioner
PMA	-2.4004	-3.6617	-2.9604	-2.6192	0.1498	Tidak Stasioner

Sumber: Olah Data Eviews 10, 2022

Pengujian dilanjutkan pada level 1st *difference* dengan hasil yang membuktikan bahwa data yang digunakan stasioner pada 1st *difference*. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikan pada $\alpha=5\%$. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa data stasioner di tingkat yang sama sehingga memenuhi syarat untuk melanjutkan uji selanjutnya yaitu uji kointegrasi.

Tabel 5
Uji Stasioneritas di Tingkat 1st Difference

Variabel	Nilai ADF	Critical Value			Prob	Keterangan
		1%	5%	10%		
PAD	-5.3855	-3.6702	-2.9640	-2.6210	0.0001	Stasioner
PEND	-4.2681	-3.6702	-2.9640	-2.6210	0.0023	Stasioner
PP	-6.2590	-3.6793	-2.9678	-2.6230	0.0000	Stasioner
PMDN	-3.9960	-3.6793	-2.9678	-2.6230	0.0046	Stasioner
PMA	-3.4581	-3.6999	-2.9763	-2.6274	0.0175	Stasioner

Sumber: Olah Data Eviews 10, 2022

c. Uji Kointegrasi

1. Metode Engle-Granger

Metode *Engle-Granger* ialah uji kointegrasi yang dipilih pada penelitian ini dengan syarat *Error Correction Model* (ECT) stasioner di tingkat level. Hasil uji kointegrasi dengan metode *Engle-Granger* menunjukkan bahwa uji akar unit ADF pada residual estimasi regresi signifikan pada $\alpha=5\%$. Maka dari itu, disimpulkan terdapat hubungan jangka panjang antar variabel, sehingga penelitian ini dapat menerapkan model ECM.

Tabel 6
Uji Akar ADF pada Tingkat Level

Variabel	Nilai ADF	Critical Value			Prob	Keterangan
		1%	5%	10%		
ECT	-4.069142	-3.661661	-2.960411	-2.619160	0.0036	Stasioner

Sumber: Olah Data Eviews 10, 2022

2. Metode Johansen

Kriteria dalam perhitungan menggunakan metode *Johansen* menunjukkan jika nilai *trace statistic* dan *maximum eigen value* lebih besar dari *critical value* maka terdapat kointegrasi. Olah data Tabel 7 dan 8, menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan jangka panjang pada variabel yang digunakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *trace value* > *critical value* dengan taraf kepercayaan 5%. Pada *maximum eigen value* > *critical value* dengan taraf kepercayaan 5%. Selain itu, nilai probabilitas dari Tabel 7 dan Tabel 8 kurang dari 5%. Berikut uji kointegrasi dengan metode *Johansen*:

Tabel 7
Trace Test

Hypothesis	Eigen Value	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob
None	0.745458	93.07768	69.81889	0.0002
At most 1	0.609935	52.02899	47.85613	0.0193

Sumber: Olah Data Eviews 10, 2022

Tabel 8
Maximum Eigenvalue

Hypothesis	Eigen Value	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob
None	0.745458	41.04870	33.87687	0.0059
At most 1	0.609935	28.24326	27.58434	0.0411

Sumber: Olah Data Eviews 10, 2022.

d. *Error Correction Model (ECM)*

Selanjutnya yaitu melakukan uji ECM guna mengetahui pertumbuhan variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berikut adalah model ECM:

1. *Estimasi Persamaan Jangka Panjang*

Model ECM yang diperoleh dengan persamaan dalam jangka panjang yakni:

$$PAD_t = -23656630237.95522 + 631.2131Pend_t + 0.176146PP_t + 158598.4PMDN_t - 230351.6PMA_t + e \quad (3)$$

Hasil di atas menunjukkan jika nilai probabilitas pada F-statistic sebesar 0.000000. Oleh sebab itu, diartikan secara bersamaan variabel jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PMDN dan PMA berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan nilai R² pada estimasi di atas sebesar 0.909163, sehingga dapat disimpulkan bahwa 90,91% variabel dependen dalam jangka panjang dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan 9,09% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 9
Estimasi Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob	R-squared	F-statistic
PEND	631.2131	154.2780	4.091402	0.0003		
PP	0.176146	0.054123	3.254524	0.0031		
PMDN	158598.4	40087.03	3.956353	0.0005		
PMA	-230351.6	196648.8	-1.171386	0.2517		
C	-2.37E+10	6.09E+09	-3.886393	0.0006		
					0.909163	67.55873

Sumber: Olah Data Eviews 10, 2022

2. *Estimasi Persamaan Jangka Pendek*

Dari hasil estimasi, maka diperoleh persamaan jangka pendek sebagai berikut:

$$D(PAD_t) = 597471299.424223 + 205.3886D(PEND_t) - 0.014758D(PP_t) + 91552.62D(PMDN_t) + 99819.95D(PMA_t) - 0.388383ECT_{t-1} + e_t \quad (4)$$

Nilai probabilitas pada ECT (-1) adalah 0.0142 berarti memiliki signifikansi pada $\alpha=0.05$ sehingga model ECM valid untuk penelitian ini. Sedangkan nilai koefisien pada ECT (-1) sebesar -3.888383 membuktikan bahwa dalam kurun waktu 3 bulanan PAD dengan keseimbangannya disesuaikan. Sedangkan untuk nilai R² pada estimasi di atas sebesar 0.343091 yang berarti 34% PAD dipengaruhi variabel independen, sisanya 66% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 10
Estimasi Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob	R-squared	F-statistic
C	5.97E+08	3.17E+08	1.884514	0.0712		
D(PEND)	205.3886	224.1504	0.916298	0.3683		
D(PP)	-0.014758	0.034465	-0.428215	0.6722		
D(PMDN)	91552.62	36390.50	2.515839	0.0187		
D(PMA)	99819.95	136251.9	0.732613	0.4706		
ECT(-1)	-0.388383	0.147344	-2.635888	0.0142		
					0.343091	2.611404

Sumber: Eviews 10 Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan estimasi di atas peneliti memperoleh hasil dalam jangka panjang, dimana terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap PAD dengan nilai yang positif dan signifikan. Hal ini berdasarkan hasil estimasi jangka panjang bahwa koefisien jumlah penduduk sebesar 631.2131 dan nilai probabilitasnya yaitu $0.0003 < \alpha = 5\%$ yang berarti signifikan. Hal ini berarti, setiap kali terjadi kenaikan jumlah penduduk 1 orang, maka PAD meningkat sebesar 631.2131 ribu rupiah. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pajak atau retribusi yang dibayarkan.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terpadat menjadi peluang untuk mendorong peningkatan PAD agar tidak bergantung pada dana transfer. Bappeda Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa realisasi PAD tahun 2021 melampaui target, dimana pendapatan tersebut berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi penunjang terbesar pendapatan daerah. Pemerintah Jawa Barat terus menggali potensi pajak di perbatasan dan merancang sejumlah sistem untuk memudahkan warga membayar pajak kendaraan bermotor di seluruh Provinsi Jawa Barat (Sudrajat, 2022).

Peluang tersebut memerlukan dukungan yang berkaitan dengan kualitas SDM karena itu aset berharga bagi pembangunan berkelanjutan. Tanpa diiringi dengan kualitas SDM akan menyebabkan masalah kependudukan seperti pengangguran dan kemiskinan. Hal ini yang kemudian akan berdampak negatif terhadap PAD khususnya dan pembangunan pada umumnya. Hasil studi kasus ini searah dengan penelitian yang dilakukan Wijaya & Yuliarmi, (2019) dan Dewi, Indrawati, & Septiani (2018) dimana jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD.

Pada hasil analisis antara pengeluaran pemerintah terhadap PAD menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.176146 dan nilai probabilitas yaitu $0.00031 < \alpha = 5\%$. Maka dari itu, setiap kali pemerintah membelanjakan 1000 rupiah maka akan meningkatkan PAD sebesar 1716 rupiah. Pengeluaran pemerintah pada kondisi ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah untuk meningkatkan pelayanan seperti administrasi.

Sehingga peningkatan anggaran yang dimanfaatkan untuk pengeluaran pemerintah dapat menambah PAD Provinsi Jawa Barat. Hasil studi kasus ini searah dengan pendapat Zein (2018) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PAD. Temuan hasil penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian Ramadhan & Syahidin, (2020) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh administrasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang akan meningkatkan kegiatan ekonomi khususnya PAD.

Pada estimasi jangka panjang dan jangka pendek menunjukan hasil bahwa PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil jangka panjang menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 158598.4 dan nilai probabilitas sebesar

$0.0005 < \alpha=5\%$. Maka dari itu, dalam jangka panjang setiap peningkatan PMDN 1 miliar rupiah, maka akan meningkatkan PAD sebesar 158.598 ribu rupiah.

Nilai koefisien dalam jangka pendek ditunjukkan sebesar 91552.62 dan nilai probabilitasnya yaitu $0.0187 < \alpha=5\%$. Setiap kenaikan PMDN sejumlah 1 miliar rupiah, akan meningkatkan PAD sejumlah 91552 ribu rupiah. Daya tarik yang dimiliki Provinsi Jawa Barat untuk berinvestasi seperti infrastruktur dan pelayanan internal merupakan peluang besar untuk mendorong peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat. Sehingga dapat mempengaruhi PAD melalui penyerapan tenaga kerja yang akan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP) Jawa Barat menyampaikan bahwa peningkatan PMA dan PMDN memberikan kontribusi pembangunan Jawa Barat dan sangat berperan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian terdahulu yang sependapat dengan studi kasus ini yaitu Sudirman, Zahari, & Arafah (2021) Lubis & Fitriani (2018) bahwa PMDN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini berarti bahwa kenaikan PMDN akan menggerakkan roda perekonomian melalui pembentukan modal sehingga berpotensi meningkatkan PAD.

Berlandaskan hasil estimasi jangka panjang dan jangka pendek bahwa PMA tidak tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun, dalam jangka panjang PMA berpengaruh positif terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar -230351.6 dan nilai probabilitas sebesar $0.2517 > \alpha=5\%$. Sedangkan dalam jangka pendek nilai koefisiennya sebesar 99818.95 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4706.

Studi kasus ini searah dengan penelitian Siwi, Muntafiah, & Wuriati (2021) yang menyatakan bahwa PMA tidak mempengaruhi PAD. Hal ini dikarenakan proses transisi dari adanya perubahan kebijakan investasi dan penyerapan investasi pada sektor unggulan masih rendah. Salah satunya disebabkan oleh penerapan sistem *online single submission* pada tahun 2017. Penerapan tersebut diperkirakan akan berdampak pada efisiensi proses investasi namun, perlunya peningkatan penyerapan investasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil estimasi dan pembahasan terkait faktor yang mempengaruhi PAD menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi PAD adalah jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan PMDN. Sehingga diartikan bahwa faktor tersebut dapat mendorong peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat mendorong kemandirian dalam membiayai belanja daerah dan tidak bertopang pada dana transfer dari luar pendapatan Provinsi Jawa Barat. Terutama penanaman modal dalam negeri karena dalam jangka panjang maupun jangka pendek dapat meningkatkan PAD.

Hal ini juga didukung oleh infrastruktur, pelayanan internal, dan produktivitas masyarakat yang sangat baik. Namun tidak lupa dengan peningkatan kualitas SDM. Meskipun demikian, PAD Provinsi Jawa Barat beberapa tahun terakhir melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat membiayai belanja daerah. Berdasarkan hasil studi kasus ini, peneliti menyampaikan beberapa saran diantaranya yaitu:

1. Bagi peneliti lainnya, mengenai faktor yang mempengaruhi PAD, diperlukan variabel lain yang belum dilibatkan pada model penelitian ini seperti: komponen pembentuk PAD, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, sektor unggulan dan sebagainya yang mungkin dapat memengaruhi PAD. Hal ini akan menghasilkan penelitian yang lebih baik.
2. Bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk memerhatikan jumlah penduduk yang padat dan terus bertambah agar dapat berkontribusi terhadap PAD sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi daerah yang mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Selain itu, meningkatkan PMDN terutama sektor

unggulan yang berdampak pada PAD namun tidak dengan mengesampingkan transparansi dan ketelitian dalam pengurusan izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Buhaerah, P. (2017). Pembangunan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Indonesia. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 1(2). <https://doi.org/10.31685/kek.v1i2.203>
- Dewi, D. L., Indrawati, L. R., & Septiani, Y. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. *Dinamic : Directory Journal of Economic*, 2(3), 647–658. <https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i3.1415>
- Elvianti, R. (2017). Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Negara di Indonesia Periode 2000-2015. *Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 31–39. <https://doi.org/10.24123/jeb.v22i1.1644>
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137–145. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. (2021). *Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahunan 2021*.
- Kurniasih, E. P. (2019). The Long-Run and Short-Run Impacts of Investment, Export, Money Supply, and Inflation on Economic Growth In Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 22(1), 21–28. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.1589>
- Lilian, E. M., Ariani, M., & Hariadi, S. (2021). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Devisa Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 25–31. <https://doi.org/10.24123/jeb.v25i1.4799>
- Lubis, R. H., & Ani, F. (2018). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Sumatera Utara Tahun 1987-2016. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 114–131. <https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1139>
- Martins, S., & Veiga, F. J. (2014). Government size, composition of public expenditure, and economic development. *International Tax and Public Finance Volume*, 21(1), 578–597. <https://doi.org/10.1007/s10797-014-9313-4>
- Ramadhan, M., & Syahidin, S. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i2.225>
- Rumondor, J. M. (2017). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Perdagangan Internasional, GDP Per Kapita, Sektor Pertanian, Dan Urbanisasi Terhadap Penduduk Bekerja Di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 85–95.
- Saputra, D. (2021). Jawa Barat Paten Kali! Jadi Nomor 1 Favorit Investor Asing. In *Ekonomi & Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211027/9/1458833/jawa-barat-paten-kali-jadi-nomor-1-favorit-investor-asing>
- Saputra, R. B. (2021). Analisis Perkembangan Pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2).
- Sari, P., Garvera, R. R., & Sihabudin, A. A. (2019). What is the Contribution of Local Original Revenue to Regional Financial Independent? *Journal of Public Administration Studies*, 3(2), 78–81. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2018.003.02.4>
- Siwi, V. N., Muntafiah, L., & Wuriati, L. C. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD Di 34 Provinsi Indonesia dengan Multilvel Mixed-Effect Model. *Dinamika Ekonomi*

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 14(2), 329–347. <https://journal.stienas-y pb.ac.id/index.php/jdeb/article/view/339>

- Sudirman, M., Zahari, M. S., & Arafah, W. (2021). The Effect of Economic Growth, Investment on Local Indigenous Income in Jambi Province. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 48(6), 164–171. <http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/610%0Ahttps://jonuns.com/index.php/journal/article/download/610/607>
- Sudrajat, A. (2022). *Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat pada 2021 Lampau Target*. Antara Jabar. <https://jabar.antaranews.com/berita/348557/pendapatan-asli-daerah-jawa-barat-pada-2021-lampau-target?page=all>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijaya, P. A. G., & Yuliarmi, N. N. (2019). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 359–388. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/43671>
- Zakaria, R., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 47–59. <https://doi.org/10.31092/JPI.V6I1.1545>
- Zein, A. S. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/doi.org/10.24952/masharif.v6i1.1122>